

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini memberi gambaran keseluruhan hasil kegiatan dan kerja keras dinas PUPR selama tahun 2021 dan selama periode 2016-2021 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai. Laporan ini berisikan laporan atas penggunaan anggaran yang meliputi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini, Dinas senantiasa berupaya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia N0. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai tidak terlepas dari peran Dinas PUPR di Kabupaten Manggarai yang tentu saja mendapat dukungan dan bantuan pihak lain, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan penyelenggaraan infrastruktur maupun yang memberi dukungan dalam perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Dinas PUPR sebagai dinas yang mengemban tugas membantu bupati membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Teknologi Jasa Konstruksi, serta Kesekretariatan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan, dalam periode 2016-2021 telah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Pada Tahun 2021 alokasi anggaran belanja Dinas PUPR pada awal TA. 2021 adalah Rp.159.871.575.163 sebelum mengalami refocusing anggaran dalam 2 (dua) tahap di awal dan pertengahan tahun 2021.

Kemudian sesuai DPPA TA. 2021 pagu Dinas PUPR menjadi sebesar Rp.124.233.066.046,- dengan realisasi Rp. 121.924.918.825 ,- (98,41%). Capaian kinerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 dari 8 sasaran strategis adalah 81,33% dengan kategori Baik. Sedangkan dari seluruh kinerja tahun 2021, baik sasaran strategis maupun program pendukung Dinas PUPR memperoleh kategori *Sangat baik* dengan capaian **90,67%**. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya nilai pencapaian ini lebih kecil. Hal ini disebabkan tahun 2021, penentuan target kinerja yang tinggi dan tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran. Pada tahun 2021 anggaran Dinas PUPR mengalami penurunan namun tidak dilakukan penyesuaian target capaian kinerja sesuai anggaran yang ada. Bahkan ada satu target yang masih ada dalam Perjanjian Kinerja meskipun anggaran untuk kegiatan intinya sudah direfocusing, yaitu anggaran pengadaan tanah TPA seluas 5 ha.

Keseluruhan capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas PUPR yang bekerja sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab demi mewujudkan “Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil Dan Merata dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa”.

Namun kami juga menyadari bahwa dalam seluruh proses penyelenggaraan infrastruktur masih banyak keterbatasan dan kekurangan yang terjadi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Karena itu segala saran dan kritikan kami terima sebagai pemacu kerja keras di masa depan.

Ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang dengan upayanya masing-masing telah membantu dinas PUPR mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang memberi kontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai khususnya dan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada umumnya.

Ruteng, Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Manggarai,

Lambertus Paput, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP.19660917 198603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK DAN LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I. PENDAHULUAN.....	7
1.1 LATAR BELAKANG.....	7
1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANGGARAI	10
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021.....	15
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	18
2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2021	20
2.4 PERJANJIAN KINERJA 2021.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	27
3.2 EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
B. REALISASI ANGGARAN	61
BAB IV PENUTUP.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Dinas PUPR 2016-2021	4
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	17
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2021	20
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2021	22
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2021	29
Tabel 3.2. Data Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2021	34
Tabel 3.3. Realisasi Penyelenggaraan Jalan jembatan Tahun 2016-2020	38
Tabel 3.4. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 2016-2021	41
Tabel 3.5. Peningkatan Jenis Konstruksi Jalan 2016-2021	43
Tabel 3.6. Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik 2016-2021	45
Tabel 3.7. Data Irigasi 2016-2021	50
Tabel 3.8. Capaian program dan kegiatan pendukung.....	60
Tabel 3.9. Realisasi Pendapatan Tahun 2021	62
Tabel 3.10. Realisasi dan Prosentase Capaian Anggaran Tahun 2021	62
Tabel 3.11. Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis.....	64
Tabel 3.12. Tingkat Efisiensi Penganggaran Tahun 2021.....	67

DAFTAR GRAFIK DAN DAFTAR LAMPIRAN

Grafik 1.1	Panjang jalan dalam kondisi baik	35
Grafik 1.2	Prosentase penduduk terlayani air minum bersih	52
Lampiran 1	PK 2020	
Lampiran 2	Pengukuran Kinerja 2021	
Lampiran 3	Data jalan	
Lampiran 4	Data Irigasi	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berbagai tugas yang dijalankan Dinas PUPR Kabupaten Manggarai telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten Manggarai selama periode 2016-2021. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Tahun 2021 sebagai tahun transisi Dinas PUPR kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.159.871.575.163 (**anggaran induk 2021**). Sebagai mana tahun sebelumnya, pada awal tahun 2021 ini Dinas PUPR mengalami penyesuaian anggaran terkait penanganan pandemic Covid-19. Refocusing dan realokasi anggaran pada Dinas PUPR terjadi pada anggaran DAU dan melalui dua tahap penyesuaian. Penyesuaian tahap pertama sebesar Rp.23.551.297.223 dan tahap kedua sebesar Rp.10.003.096.302,- sehingga pagu Dinas PUPR menjadi sebesar Rp.126.317.181.638,-. Penyesuaian tahap 2 ini juga merupakan penyesuaian pagu setelah ditetapkannya SK Gubernur NTT Nomor 113/KEP/HK/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi NTT, dimana Dinas PUPR Kabupaten Manggarai mendapat bantuan sebesar 7.000.000.000 untuk pembangunan infrastruktur ruas jalan Golo Gereng Bea Mese. Sedangkan refocusing anggaran dinas PUPR ini terjadi pada belanja perjalanan dinas, biaya makan minum rapat, honorarium, belanja pengadaan barang. Sedangkan untuk kegiatan proyek dilakukan pengurangan nilai dan volume pekerjaan untuk direalokasikan ke penanganan Covid 19.

Kebijakan refocusing dan realokasi tahun 2021 berdampak pada pencapaian target kinerja dinas PUPR. Dinas PUPR di Tahun 2021 harus mengurangi target penanganan jalan dan irigasi. Sedangkan alokasi anggaran bidang ke ciptakarya berkurang pada pekerjaan infrastruktur permukiman, drainase dan pengadaan tanah untuk TPA yang semula direncanakan 5 ha tidak terealisasi di tahun 2021.

Namun demikian ditengah pandemic dan penyesuaian anggaran tersebut Dinas PUPR sebagai salah satu instansi yang mengemban tugas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai terus berupaya meningkatkan kehandalan infrastruktur PUPR demi mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air, konektivitas, layanan infrastruktur permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 Dinas PUPR melaksanakan 11 Program. Tahun 2021 ini merupakan tahun awal pelaksanaan program

kegiatan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan 11 (sebelas) program strategis yaitu :

- (1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA);
- (2) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM;
- (3) PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL;
- (4) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH;
- (5) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE;
- (6) PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN;
- (7) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG;
- (8) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN;
- (9) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN;
- (10) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI;
- (11) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG;

Berdasarkan permendagri tersebut terkait urusan limbah yang sebelumnya di laksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Manggarai. Sedangkan pengelolaan persampahan tetap menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai dan Dinas PUPR Kabupaten Manggarai hanya menangani penyediaan infrastruktur persampahan.

Pada tahun 2021 ini Dinas PUPR memiliki 8 (delapan) sasaran strategis yang hendak dicapai. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 melaksanakan 11 program, yaitu :

- (1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA);
- (2) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM;

- (3) PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL;
- (4) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH;
- (5) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE;
- (6) PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN;
- (7) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN;
- (8) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI;
- (9) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG;
- (10) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG;
- (11) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dalam menjalankan tugasnya Dinas PUPR mendapat dukungan dari 5 bidang yang menjalankan 10 (sepuluh) program sasaran strategis dan 1 sekretariat yang menjalankan 1 program pendukung.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, seluruh program kegiatan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 68 orang PNS dan 14 orang THL yang tersebar pada 5 (lima) bidang, 15 (lima belas) sub bidang dan didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan strategis guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat pagu sebesar Rp.124.233.066.046,-sesuai APBD Perubahan TA.2021, yang terdiri dari dana Dak Rp.51.852.013.300,- dan DAU Rp. 72.381.052.746,-, dengan alokasi belanja modal sebesar Rp. 101.939.797.057,- (82,055%) dan belanja operasional Rp.22.293.268.989,- (17,94%).

Capaian kinerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 dari 8 sasaran strategis adalah 81,33% dengan kategori Baik. Sedangkan dari seluruh kinerja tahun 2021, baik sasaran strategis maupun program pendukung Dinas PUPR memperoleh kategori *Sangat baik* dengan capaian **90,67%**. Capaian terhadap penganggaran yaitu untuk belanja operasional dan belanja modal sebesar Rp.121.924.918.825,- dengan persentase 98,14% dari target 100% dan progres fisik sebesar 99,03%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, rata-rata capaian kinerja dari 7 sasaran strategis dan 1 program pendukung, capaian kinerja Dinas PUPR Tahun 2020 yaitu sebesar 98,27%; dan dari jumlah anggaran Rp.96.974.892.689,- terealisasi Rp.93.971.080.401,- atau 96,90%; maka penyerapan anggaran Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2021 naik sebesar 1,72%, sedangkan capaian kinerja tahun 2021 lebih rendah atau turun 1,53%. Hal ini erat kaitannya dengan refocusing anggaran tahun 2020 dimana pemangkasan anggaran tersebut tidak diikuti dengan penyesuaian target dalam PK, sehingga tingkat capaian kinerja menjadi lebih rendah.

Secara rinci capaian kinerja Dinas PUPR selama periode 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini :

No	SASARAN	% RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN						% CAPAIAN KEUANGAN						TINGKAT EFISIENSI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	46,7	129,8	100,8	116,5	67,7	84,71 1	92,7	94,7	98,9	94,0	98,03	99,0	-46,0	35,1	1,9	22,4	-30,3	14,5
2	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	81,4	75,4	118,2	123,5	110,2	114,5	99,1	93,2	99,9	99,0	92,86	99,8	-17,7	-17,8	18,3	24,6	17,3	-14,7
3	Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air minum Bersih	100,0	92,4	82,6	84,3	80,9	82,1	95,5	89,0	98,2	96,6	86,9	97,1	4,5	3,4	-15,6	-12,3	-6,0	15,0
4	Tersedianya sarana persampahan						0,0						15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
5	Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi Lingkungan						100,0						99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
6	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman	106,02	97,4	100,0	94,8	253,5	132,3	97,9	96,8	98,9	99,3	99,6	91,2	8,1	0,5	1,1	-4,4	153,9	-41,1
7	Berkurangnya Resiko Daya Rusak Air Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 12 kecamatan	0,0	71,6	59,0	95,9	100,0			100,0	99,7	99,8	95,3	0,0	0,0	-28,4	-40,7	-3,9	4,7	0,0
8	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	33,0	0,0	55,6	45,5	43,9	43,9	99,2	97,3	83,3	93,2	96,4	86,3	-66,2	-97,3	-27,7	-47,7	-52,6	42,5
9	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	100,0	65,7	147,6	50,5	31,7	93,3	92,1	93,8	97,3	98,5	100,0	73,8	7,9	-28,1	50,3	-48,0	-68,3	-19,5
	JUMLAH SASARAN STRATEGIS	98,7	92,8	94,8	87,3	98,3	81,35	94,0	94,4	98,8	95,2	96,96	98,41	4,7	-1,5	-4,0	-7,9	1,3	17,1
8	Program Pendukung	100,0	100,0	100,0	100,00	100,0	100,0	96,0	91,9	97,5	94,6	91,0	93,10	4,0	8,1	2,5	5,4	9,0	-6,9
	JUMLAH SASARAN STRATEGIS DAN PENDUKUNG	99,35	96,42	97,41	93,64	99,13	90,67	94,0	94,4	98,8	95,2	96,90	98,14	5,3	2,1	-1,4	-1,5	2,2	7,5

Dari tabel diatas terlihat capaian tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan dan penurunan prosentase capaian kinerja Dinas PUPR. Secara umum untuk tahun 2021 prosentase capaian kinerja lebih rendah disebabkan karena :

1. Keterbatasan anggaran akibat refocusing dan realokasi anggaran;
2. Penentuan target sasaran strategis yang akan dicapai tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran, terutama setelah refocusing anggaran.

Namun, berbagai capaian yang diperoleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan dari para stakeholder terkait. Kedepannya Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai akan terus melakukan perbaikan guna mencapai hasil yang lebih optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan laporan instansi yang disusun dengan menguraikan seluruh proses dalam suatu instansi sejak awal tahun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan harus dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja instansi pemerintah tersebut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah yang meliputi penggunaan sarana prasarana, sumber daya dan anggaran.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dijelaskan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja dimaksud berisi uraian singkat organisasi terkait tugas dan fungsi; Rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja dan evaluasi serta analisis pencapaian kinerja.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 ini, penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga pemerintah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang termasuk oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu entitas akuntabilitas SKPD.

Penyelenggaraan SAKIP dimaksud meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian Kinerja;
- c. pengukuran Kinerja;
- d. pengelolaan data Kinerja;
- e. pelaporan Kinerja; dan

f. reviu dan evaluasi Kinerja

Laporan Kinerja yang disusun Dinas PUPR ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai selama tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Seluruh capaian kinerja tahun 2021 akan diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi selama satu periode (2016-2021). Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

Pada tahun 2021 Dinas PUPR melaksanakan program terkait persampahan dan limbah. Program kegiatan tersebut belum disesuaikan kedalam Renstra Dinas PUPR. Hal ini terjadi untuk melaksanakan amanat Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana program terkait persampahan dan limbah, menjadi urusan bidang pekerjaan umum.

Tahun 2021 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan 10 (sepuluh) program strategis dan 1 (satu) program pendukung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.124.233.066.046,- sesuai APBD Perubahan TA.2021, yaitu dana Dak Rp.51.852.013.300,- ; DAU Rp. 72.381.052.746,-, yang terdiri dari belanja modal Rp.101.939.797.057,- (82,055%) dan belanja operasional Rp.22.293.268.989,- (17,94%). Anggaran tersebut dialokasi untuk melaksanakan program kegiatan bidang penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan SPAM, pengembangan permukiman, persampahan dan limbah, penataan ruang, pembinaan jasa konstruksi, kegiatan pembinaan sumber daya manusia, dan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai memperhatikan keseimbangan berbagai aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel. Namun berbagai upaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Dinas PUPR pada lima tahun terakhir adalah:

1. Air minum dan sanitasi

Belum terpenuhinya layanan air minum bersih secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai menjadi isu penting dalam periode RPJMD Kabupaten Manggarai 2016-2021. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan sebanding dengan tingkat kebutuhannya, telah memberikan dampak bagi peningkatan cakupan pelayanan air minum bagi penduduk. Kebutuhan air minum bersih tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas layanan air minum; ditambah lagi berkurangnya debit pada sumber mata air baik akibat perubahan iklim maupun karena perilaku manusia serta masalah pembebasan lahan di sumber mata air. Di sektor lain muncul permasalahan seperti kurangnya infrastruktur untuk meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air, baik untuk sanitasi maupun untuk irigasi.

2. Persampahan

Belum tersedianya TPA, tidak adanya alat penghancur sampah dan kondisi sarana pendukung pengelolaan persampahan yang minim seperti kendaraan pengangkut sampah yang rusak.

3. Penyelenggaraan jalan/jembatan

Masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan dalam kondisi mantap, kurangnya sarana pendukung kelengkapan jalan (drainase, trotoar, dll), serta masalah kerusakan jalan pada ruas-ruas jalan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai.

4. Penataan Ruang

Isu strategis terkait penataan ruang disebabkan karena belum ditetapkannya regulasi baik RTRW, RDTR maupun regulasi lain terkait tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang salah satunya berakibat pada pemanfaatan ruang menjadi tidak sesuai peruntukan fungsi ruang; terjadinya alih fungsi lahan/ruang seperti dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun, serta menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung (mata air, sempadan sungai dll). Persoalan lain adalah belum maksimalnya penyelenggaraan IMB dan SLF.

5. Jasa konstruksi

Belum tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi menjadi permasalahan jasa konstruksi di Kabupaten Manggarai. Disamping itu belum terlaksananya diklat bagi tenaga kerja konstruksi.

6. Sumber Daya Manusia

Dalam periode 2016-2021 jumlah SDM aparatur Dinas PUPR yang memiliki kualifikasi khusus konstruksi masih sangat kurang. Akibatnya kegiatan-kegiatan proyek yang dilakukan tidak dapat ditangani secara penuh.

Uraian tentang jawaban atas isu strategis tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja ini dan diharapkan akan memberikan umpan balik untuk mencari solusi terbaik bagi masalah yang ada dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan. Upaya dimaksud hendaknya merupakan usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan baik proses maupun cara kerja demi peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANGGARAI

- Dasar hukum berdirinya organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

- Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Teknologi Jasa Konstruksi, serta Kesekretariatan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan;

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Sekretariat;
- b. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Air;
- c. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Bina Marga;
- d. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Cipta Karya;
- e. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Penataan Ruang;
- f. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Teknologi Jasa Konstruksi;
- g. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Secara rinci Strukur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021

1.3. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2021 berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum perlunya penyusunan laporan kinerja, gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, isu strategis dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2021 meliputi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahunan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021 dan analisis capaian 2016-2021 serta target dan realisasi anggaran tahun 2021

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dan

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran:

- 1) Matriks Renstra
- 2) Rencana kinerja
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Pengukuran Kinerja
- 4) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

Visi Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 adalah **“Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil Dan Merata dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa”**.

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Manggarai tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 dan tetap berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021, berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dalam laporan ini juga akan disampaikan perbandingan keseluruhan target dan capaian dalam periode RPJMD 2016-2021 untuk dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan pada periode berikutnya.

Dalam rangka mendukung Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) RPJMD Kabupaten Manggarai 2016-2021 yakni (misi 1) meningkatkan perekonomian manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan misi (4) mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang, maka Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengacu pada RPJMD

yang telah ditetapkan tersebut, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase/gorong-gorong, air minum, normalisasi saluran sungai, jaringan irigasi, pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, jalan lingkungan, pembinaan jasa konstruksi dan penataan ruang.

Secara ringkas substansi Renstra, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dapat di ilustrasikan sebagai berikut:

VISI

Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal dan berbasis Tata Ruang Untuk Mendukung Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil dan Merata, dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa

MISI:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan dari pembangunan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan;
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang;

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jangka menengah adalah:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
I	Meningkatnya keandalan infrastruktur jalan dan jembatan	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan publik lainnya	1). Meningkatkan kemantapan jalan melalui peningkatan kapasitas dan struktur jalan dan pemeliharaan jalan 2).Peningkatan Fasilitas Kelengkapan Jalan dan Jembatan 3).Mempertahankan kemantapan jalan dan jembatan melalui pemeliharaan jalan dan jembatan	1) Penyusunan program dan anggaran yang sesuai dengan rencana penyelenggaraan jalan yang berkelanjutan 2) Melaksanakan pembangunan jalan melalui peningkatan kapasitas dan struktur jalan 3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan UPR 4) Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
II	Meningkatnya ketersediaan debit air untuk kebutuhan masyarakat	1. Meningkatkan cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat 2.Meningkatnya pembangunan sarana prasarana air bersih	1. Konservasi lingkungan air 2. Perlindungan sumber mata air 3. Tata kelola air minum dan air irigasi 4. Pemberdayaan masyarakat 5.Peningkatan pembangunan sarana prasaran air bersih	1. Pembangunan embung, sumur resapan, lubang resapan biopori) 2.Pengendalian eksploitasi pemanfaatan air 3. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Air Irigasi, Embung dan Pompanisasi 4. Pengaturan tata kelola sumber air minum dan air irigasi 5. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Dan Rencana Detail 6. Pembangunan Dan Perluasan Jaringan Air Minum 7. Dukungan Kebijakan Nasional 100-0-100 (100% Akses Air Minum, 0% Daerah Kumuh, 100% Sanitasi)
III	Meningkatnya pengamanan DAS di 12 Kecamatan	Berkurangnya Resiko Daya Rusak Air Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 12 kecamatan	Penyelamatan Kawasan Budidaya (Permukiman, Pertanian) dari Bangunan Sepanjang Daerah Aliran Sungai	1. Pengamanan Daerah Aliran Sungai (DAS) Peningkatan Jaringan Irigasi Primer, Sekunder, Tersier 2. Normalisasi Daerah Aliran Sunagi(DAS) 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
IV	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastuktur berbasis tata ruang	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	<p>1. Optimaslisai penyebarluasan informasi, perencanaan dan pengendalian tata ruang</p> <p>2. Pemanfaatan ruang sesuai KLHS, RTRW/RDTR dan Neraca Lngkungan</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi para pemangku kepentingan lintas sektor</p> <p>2. Penyusunan dokumen RDTR dan penetapan Perda RDTR</p> <p>3. Kajian Lngkungan Hidup Strategid dan Neraca Lingkungan</p> <p>4. Pembentukan Tim Penertiban Perda Bangunan Gedung dan Perda RDTR</p> <p>5. Penengakan Aturan</p>
VI	Penyediaan sanitasi permukiman	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman perkotaan	Peningkatan Fasilitas Pendukung Jalan Utama Dalam Kota Ruteng	Pembangunan Trotoar, Drainase Jalan Utama Dalam Kota Ruteng

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai serta RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TA : 2021

No	Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian dan pelayanan publik lainnya	1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang Jalan seluruhnya}} \times 100$	Bidang Bina Marga
		1.2	Prosentase Jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan}} \times 100$	Bidang Bina Marga
2	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	2.1	Rasio Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas Lahan Budidaya}} \times 100$	Bidang Sumber Daya Air
		2.2	Prosentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100$	Bidang Sumber Daya Air
3	Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air minum Bersih	3.1	Prosentase Jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Bidang Cipta Karya
4	Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi Lingkungan	4.1	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang terbangun}}{\text{Target sarana dan prasarana sanitasi lingkungan}} \times 100$	Bidang Cipta Karya
5	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	5.1	Prosentase Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yg memiliki dokumen RDTR}}{\text{Jumlah kecamatan di daerah kabupaten}} \times 100$	Bidang Tata Ruang

2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Setiap sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu dengan bertambahnya urusan persampahan dan limbah pada Dinas PUPR, maka Dinas PUPR Kabupaten Manggarai telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2021

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	1.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	67,55%
		1.2 Peningkatan jenis konstruksi jalan - Telford - Lapen - HRS (Hotmix)	146 Km 554,86 Km 145,56 Km
		1.3 Jumlah jembatan dalam kondisi baik	44 Unit
2	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	2.1 Rasio Jaringan Irigasi	82,39%
		2.2 Prosentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	54,44%
3	Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air minum Bersih	3.1 Prosentase Jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih	100,00%
4	Tersedianya sarana persampahan	5.1 luas lahan TPA yg tersedia	5 Ha
5	Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi Lingkungan	4.1 Jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	1444 KK
6	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman	5.1 Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	100,00%
7	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	6.1 Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	95,00%
8	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	7.1 Prosentase Jasa Konstruksi yang terawasi/Persentase layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100,00%

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau *reward* dan sanksi atau *punishment*.

Tahun 2021 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai memiliki 8 (delapan) target sasaran strategis Dinas yang harus dicapai melalui pelaksanaan 10 (Sepuluh) program prioritas dan 1 (satu) Program Pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.124.233.066.046,-sesuai APBD Perubahan TA.2021. Anggaran ini yang terdiri dari dana Dak Rp.51.852.013.300,- dan DAU Rp. 72.381.052.746,-, dengan alokasi belanja modal sebesar Rp.101.939.797.057,- (82,055%) dan belanja operasional Rp.22.293.268.989,- (17,94%). Selain itu, Dinas PUPR juga melaksanakan 1 (satu) program penunjang mendukung pelaksanaan program-program prioritas.

Sasaran strategis yang hendak dicapai dibuat dalam perjanjian kinerja ke setiap jenjang pemegang peran pada masing-masing bidang Dinas PUPR sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Berikut ini Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	67,55%
		1.2	Peningkatan jenis konstruksi jalan	
			- Telford - Lapen - HRS (Hotmix)	146 Km 554,86 Km 145,56 Km
1.3	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	44 Unit		
2	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	2.1	Rasio Jaringan Irigasi	82,39%
		2.2	Prosentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	54,44%
3	Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air minum Bersih	3.1	Prosentase Jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih	100,00%
4	Tersedianya sarana persampahan	5.1	luas lahan TPA yg tersedia	5 Ha
5	Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi Lingkungan	4.1	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	1444 KK
6	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman	5.1	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	100,00%
7	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	6.1	Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	95,00%
8	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	7.1	Prosentase Jasa Konstruksi yang terawasi/Persentase layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100,00%

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN :

PROGRAM :	ANGGARAN :
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	80.343.521.308
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	80.343.521.308
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	808.797.000
Pembangunan Jalan	54.724.544.490
Rehabilitasi Jalan	18.946.390.918
Pemeliharaan Rutin Jalan	1.124.014.226
Pembangunan jembatan	4.723.424.619
Rehabilitasi Jembatan	16.350.055
2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.273.200.959
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.273.200.959
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.001.100.959
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	272.100.000
3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.054.089.234
Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	15.054.089.234
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	93.163.500
Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan / Perbaikan SPAM	93.251.500
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.613.848.234
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.761.630.000
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	129.096.000
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	403.100.000
4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	143.090.000
Kegiatan: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	143.090.000
Penyediaan Sarana Persampahan	143.090.000
5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.084.468.400
Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.084.468.400
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	76.862.000

PROGRAM :	ANGGARAN :
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	11.007.606.400
6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.717.604.116
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.717.604.116
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	29.200.000
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.585.265.116
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	53.589.000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	500.950.000
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	548.600.000
7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	775.852.000
Kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	775.852.000
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	775.852.000
8 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	212.130.300
8.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	88.110.800
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	67.110.800
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	21.000.000
8.2 Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.008.500
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	37.426.000
Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	5.156.000
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	7.524.000
Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	55.902.500
8.3 Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	5.300.000
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	5.300.000
8.4 Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	12.711.000
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	12.711.000

PROGRAM :	ANGGARAN :
9 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	887.067.000
Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	887.067.000
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	179.927.000
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	707.140.000
10 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	366.369.000
Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	366.369.000
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	191.225.000
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	135.744.000
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	39.400.000
JUMLAH PROGRAM PRIORITAS (10) DENGAN JUMLAH ANGGARAN	117.857.392.317
PROGRAM PENDUKUNG :	
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.143.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.437.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.510.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.145.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.001.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.000.000
1.2 Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.063.841.229
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.964.041.229
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.800.000
1.3 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.409.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000

PROGRAM :	ANGGARAN :
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.560.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.440.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.000.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000
Penyediaan Bahan/Material	4.679.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.050.000
1.4 Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.200.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000
1.5 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.080.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	631.330.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.750.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-
JUMLAH PROGRAM PENDUKUNG (1) DENGAN JUMLAH ANGGARAN	6.375.673.729
TOTAL PROGRAM (11) DENGAN TOTAL ANGGARAN	124.233.066.046

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas PUPR diukur dengan cara mengukur masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis sesuai RKT Dinas PUPR Tahun 2021. Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran strategis. Secara umum sasaran strategis dinas PUPR adalah meningkatkan keandalan infrastruktur dalam rangka mewujudkan layanan infrastruktur dasar, konektivitas, ketahanan pangan dan ketahanan air, sanitasi, penataan ruang yang semuanya diselenggarakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran strategis ini akan terwujud dengan adanya hasil/outcome dari program kegiatan yang dilaksanakan dinas PUPR yang tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan/memanfaatkan data kinerja, untuk itu perlu dibangun system informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan system informasi yang ada. Pengumpulan data kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, dilakukan dengan menyebarkan format Pengukuran Kinerja kepada setiap Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai serta melakukan konfirmasi secara langsung kepada Sub Bagian dan Seksi tersebut. Selain itu dalam rangka memperoleh data yang akurat dinas PUPR juga berkoordinasi dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan data dan informasi.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 8 (delapan) sasaran strategis. Untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan program dan kegiatan strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, capaian kinerja Dinas PUPR tahun 2021 adalah sebesar 90,67% dengan kategori Sangat Baik. Capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis Dinas PUPR Kabupaten Manggarai diperoleh hasil pengukuran *baik* dengan rata-rata capaian kinerja **81,35%**. Keberhasilan ini disumbangkan oleh capaian dari 8 (delapan) sasaran strategis Dinas. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan pendukung lainnya diperoleh hasil *memuaskan* dengan capaian kinerja **100%**. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2021

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN : 2021

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3		4	5	6	
1	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	67,55%	65,18	96,49	
		1.2	Peningkatan jenis konstruksi jalan - Telford - Lapen - HRS (Hotmix)	846,42	59,91	59,91	
				146 Km	60,94	60,94	
				554,86 Km	56,45	56,45	
				145,56 Km	72,07	72,07	
		1.3	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	44 Unit	97,727273	97,73	
		Rata-rata 1					84,711
Kategori					Cukup		
2	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	2.1	Rasio Jaringan Irigasi	82,39%	80,28	97,44	
		2.2	Prosentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	54,44%	71,64	131,59	
		Rata-rata 2					114,52
		Kategori					Memuaskan
3	Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air minum Bersih	3.1	Prosentase Jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih	100,00%	82,08	82,08	
		Rata-rata 3					82,08
		Kategori					Baik

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
4	Tersedianya sarana persampahan	4.1	luas lahan TPA yg tersedia	5 Ha	0	0
		Rata-rata 4				0
		Kategori				Kurang
5	Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi Lingkungan	5.1	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	1444 KK	100	100
		Rata-rata 5				100
		Kategori				Memuaskan
6	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman	6.1	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	100,00%	132,29	132,29
		Rata-rata 6				132,29
		Kategori				Memuaskan
7	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	7.1	Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	95,00%	41,67	43,86
		Rata-rata 7				43,86
		Kategori				Kurang
8	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	8.1	Prosentase Jasa Konstruksi yang terawasi/Persentase layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100,00%	93,33	93,33
		Rata-rata 8				93,33
		Kategori				Sangat Baik
Rata-rata capaian sasaran 1 s/d 8						81,348

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Kategori					BAIK
PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG :					
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Terlaksananya Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Prosentase Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas	100	100,00	100,00
2	Terlaksananya penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas dengan baik dan benar	2 Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan baik dan tepat waktu	100	100,00	100,00
3	Terlaksananya Koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian	3 Prosentase Jumlah urusan kepegawaian yang terlaksana	100	100,00	100,00
4	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan administrasi perkantoran	4 Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	100	100,00	100,00
	Rata-rata				100,00
	Kategori				MEMUASKAN
	Rata-rata capaian sasaran				90,67
	Kategori				SANGAT BAIK

3.2. EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai merupakan capaian kumulatif untuk 1 (satu) periode RPJMD (2016-2021). Capaian Kinerja sesuai Sasaran Strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Sasaran 1: Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan

Sasaran “Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan” dengan tiga indikator yaitu (1) proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik; (2) Peningkatan jenis konstruksi jalan; dan (3) Jumlah jembatan dalam kondisi baik.

No	Indikator Kinerja	Sat.	Thn 2020		%	Thn 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	67,55	54,50	80,68	67,55	65,18	96,49
2	Peningkatan jenis konstruksi jalan					846,42	507,121	59,91
	2) Telford	km	17,03	7,867	46,19	146	88,973	60,94
	3) Lapen	km	103,71	27,198	26,40	554,86	313,238	56,45
	4) HRS	km	35,94	-	0	145,56	104,911	72,07
3	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	unit	5 unit	5 unit	100	44 unit	43 unit	97,73
	RATA-RATA				67,72			84,711
	KATEGORI							BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran Sasaran Strategis “**Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan**” yang diukur dengan menggunakan tiga indikator, diperoleh capaian kinerja 84,711% dengan *kategori Baik*. *Capaian ini merupakan capaian dalam periode 2016-2021 dan* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**

Panjang jalan kondisi baik merupakan capaian penanganan jalan, baik melalui pekerjaan peningkatan struktur jalan maupun melalui rehabilitasi/pemeliharaan jalan selama tahun 2021 dan akumulasi tahun 2016-2021. Target proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik akhir periode 2016-2021 adalah **67,55%**, **terrealisasi 65,18%** atau **1220,725km** dari total panjang jalan **1872,867km**, dengan prosentase capaian indikator **96,49%**. Atau dengan rumus :

$$\text{Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik} = \frac{\text{panjang jalan kondisi baik}}{\text{panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$$

Sehingga diperoleh :

$$\text{Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik} = \frac{1220,725}{1872,867} \times 100\% = 65,18\%$$

Sedangkan prosentase capaian realisasi proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dihitung dengan rumus :

$$\text{Prosentase capaian realisasi proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik} = \frac{\text{Prosentase realisasi proporsi panjang jalan kondisi baik}}{\text{Prosentase target proporsi panjang jalan kondisi baik}} \times 100\%$$

Sehingga diperoleh :

$$\text{Prosentase capaian realisasi proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik} = \frac{65,18\%}{67,55} \times 100\% = 96,49\%$$

Dibandingkan dengan capaian sampai tahun 2020 dengan indikator yang sama dimana target sebesar 67,55% realisasi sebesar 54,50% atau sepanjang **1038km** dengan tingkat capaian 80,68%, maka terlihat realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan atau bertambah 182,725km. Perlu dijelaskan, pada tahun 2020 panjang jalan yaitu 1.904,60km dan panjang jalan tahun 2021 1854,88 km (*Hasil survey data base jalan tahun 2021*).

Dalam periode 5 tahun 2016-2021, kinerja dinas PUPR untuk mencapai target khususnya pada indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3.2. Data Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
Tahun 2015-2021**

Tahun	% Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Ket.
2015	56,56	
2016	59,20	
2017	54,32 (923,75 Km)	Panjang jalan kabupaten =1532,57 km dan jalan non status sepanjang 168,32km. Panjang jalan seluruhnya 1.700,89 km. Kondisi baik 923.90 km, kondisi sedang 121 km, kondisi rusak 463.24 km dan kondisi rusak berat sepanjang 192.74 km
2018	56,73(964,91 Km)	Panjang jalan kabupaten =1532,57 km dan jalan non status sepanjang 168,32km. Panjang jalan seluruhnya 1.700,89 km. Kondisi baik 964.99km, kondisi sedang 118.08km, kondisi rusak 453.58 km dan rusak berat 164.25km
2019	58,46 (971,60 Km)	Panjang jalan kabupaten =1.493,73 km dan jalan non status sepanjang 168,32km. Panjang jalan seluruhnya 1.662,045 km. Kondisi baik 971,60km, kondisi sedang 110,01 km, kondisi rusak 196,80 km dan rusak berat 383,63 km
2020	54,50 (1038km)	Panjang jalan kabupaten =1.493,73 km dan jalan desa sepanjang 410,87km. Panjang jalan seluruhnya 1.904,60km. Kondisi baik 1038km, kondisi sedang 106,73km, kondisi rusak 161,34km dan rusak berat 598,53km
2021	65,18 %(1220,725km)	Panjang jalan kabupaten =1.461,997km dan jalan desa sepanjang 410,87km. Panjang jalan seluruhnya 1.872,867km. Kondisi baik 1220,725km, kondisi sedang 36,687km, kondisi rusak 72,315km dan rusak berat 543,139km

Grafik.3.1.Panjang jalan dalam kondisi baik



- Peningkatan jenis konstruksi jalan
 - 5) Telford : target 146 km
 - 6) Lapen : target 554,86 km
 - 7) HRS/Hotmix : target 145,56 km

Peningkatan jalan untuk jenis konstruksi HRS/Hotmix terealisasi 13,45 km untuk tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi output tahun 2020, maka realisasi output tahun 2021 mengalami peningkatan 100%, sehingga total panjang HRS 2016-2021 adalah **104,911km** dari target 145,56km;

Lapen terealisasi 29,286 km untuk tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi output tahun 2020 sepanjang 27,198 km, maka realisasi output tahun 2021 mengalami peningkatan. Sampai tahun 2021 total panjang Lapen adalah **313,237km** dari target 554,86km atau mencapai 56,45%;

Telford terealisasi 7,65 km untuk tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi output tahun 2020 sepanjang 7,861km, maka realisasi output tahun 2021 sedikit lebih rendah. Namun total panjang telford 2016-2021 *sepanjang* **88,973km** dari target 146 km, dengan prosentase 60,94% menunjukkan kinerja yang cukup.

- Telford : realisasi 88,973 km

Untuk mengukur persentase realisasi jalan telford diperoleh dengan rumus realisasi panjang jalan telford dibagi target panjang jalan telford dikali 100%.

Atau dengan perhitungan :

$$\frac{88,973 \text{ km}}{146 \text{ km}} \times 100\% = 60,94\%$$

Tingkat capaian realisasi

$$\frac{60,94\%}{100\%} \times 100\% = 60,94\%$$

- Lapen : realisasi **313,237km**

Untuk mengukur persentase realisasi jalan lapen diperoleh dengan rumus realisasi panjang jalan lapen dibagi target panjang jalan lapen dikali 100%.

Atau dengan perhitungan :

$$\frac{313,237 \text{ km}}{554,86 \text{ km}} \times 100\% = 56,45\%$$

Tingkat capaian realisasi

$$\frac{56,45\%}{100\%} \times 100\% = 56,45\%$$

- HRS/Hotmix : realisasi **104,911Km**

Untuk mengukur persentase realisasi jalan HRS diperoleh dengan rumus realisasi panjang jalan HRS dibagi target panjang jalan HRS dikali 100%.

Atau dengan perhitungan :

$$\frac{104,991}{145,56 \text{ km}} \times 100\% = 72,07\%$$

Tingkat capaian realisasi

$$\frac{70,07\%}{100\%} \times 100\% = 72,07\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran di atas realisasi peningkatan jalan berdasarkan jenis konstruksi pada tahun 2021 mengalami peningkatan meskipun tidak dapat mencapai target kabupaten. Hal ini disebabkan karena pemangkasan anggaran infrastruktur untuk melaksanakan kebijakan nasional refocusing dan realokasi anggaran untuk

penanganan covid-19 sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pada Dinas PUPR tidak dapat mengakomodir target awal pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur sehingga target-target tidak dipenuhi. Disisi lain target-target yang sudah ditetapkan tidak disesuaikan dengan sisa anggaran yang tersedia atau tidak dilakukan perubahan terhadap target-target tersebut.

- Jumlah Jembatan dalam kondisi baik

Capaian kinerja jumlah jembatan dalam kondisi baik merupakan capaian kinerja melalui pekerjaan pembangunan jembatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan. Pada tahun 2021 terdapat 7 paket pekerjaan pembangunan jembatan, dan paket KDP tahun 2020 yaitu 2 paket pembangunan jembatan, 1 paket rehab/pemeliharaan jembatan. Dari seluruh pekerjaan tersebut telah menambah jumlah jembatan dalam kondisi baik, sehingga dari target 44 unit (target 2016-2021) jumlah jembatan dalam kondisi baik, terealisasi 43 unit (97,73%).

Jika dibandingkan dengan realisasi sampai tahun 2020, jumlah jembatan 279 unit dan jumlah jembatan dalam kondisi baik adalah 272 unit jembatan, maka kondisi akhir 2021 ada penambahan jembatan sebanyak 5 unit, jembatan rusak berkurang 1 unit.

Kondisi akhir 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah jembatan yang terbangun adalah 284 unit, jumlah jembatan dalam kondisi baik 278 unit, dan 6 unit yang rusak, yaitu 1 unit yang rusak berat dan 5 unit yang rusak ringan.

Dalam perjalanan terjadi pengalihan status 2 (dua) unit jembatan yaitu jembatan Wae Ncuring dan Wae Gurung yang menjadi asset Provinsi NTT; sehingga sampai akhir 2021 jumlah jembatan menjadi 282 unit, jembatan kondisi baik 276 unit dan jembatan rusak 6 unit .

Untuk mendukung 3 (tiga) indikator di atas, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.80.343.521.308,- dan terserap Rp.79.553.120.134,- atau 99,02% melalui Program Penyelenggaraan Jalan, dan Program Pengembangan Permukiman dengan anggaran Rp.775.852.000,-,realisasi Rp.773.393.000,- (99,68%); sehingga total anggaran adalah Rp.81.119.373.308,- terealisasi Rp.80.326.513.134,- atau 99,02%.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa capaian sasaran strategis **“Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan”** mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, seperti terlihat tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3. Realisasi Penyelenggaraan Jalan Jembatan 2016-2021

NO	Jenis Konstruksi	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Total
1	HRS (km)	13,450	-	19,12	18,21	26,19	27,94	104,911
2	LAPEN (km)	29,286	27,20	62,42	54,62	55,33	84,38	313,238
3	TELFORD (km)	7,650	7,87	12,22	13,23	11,23	36,77	88,973
4	RABAT/PAVING/ TROTOAR (km)	0,853	0,35	2,24	6,48	2,13	5,96	18,012
5	TANAH (PEMBUKAAN JALAN BARU) (km)	5,700	2,40	5,50	4,05	32,00	53,25	102,900
6	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN (km)	34,693	68,89	24,70	20,78	26,10	27,67	202,827
	TOTAL (km)	91,632	106,702	126,199	117,376	152,977	235,975	830,861
7	JEMBATAN (unit)	5	5	3	5	7	13	38,00
8	JEMBATAN KONDISI BAIK (unit)	6	5	6	6	7	13	43,00

Sebagaimana uraian diatas, persentase capaian kinerja Sasaran Strategis **“Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan”** adalah **65,18 %** dengan *kategori Baik*. Pencapaian sasaran ini bukan tanpa hambatan dan kendala. Keterbatasan anggaran menjadi salah satunya. Pelaksanaan kebijakan nasional untuk penanganan covid 19 melalui realokasi anggaran yang salah satunya menyebabkan berkurangnya anggaran pada Dinas PUPR, yang tidak diikuti dengan perubahan target kinerja.

Sedangkan tidak terserapnya anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah pada tahun 2021 terdapat beberapa pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan berakhirnya masa kontrak (realisasi fisik tidak mencapai 100%) sehingga untuk penyerapannya disesuaikan realisasi fisik pekerjaan. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut disebabkan karena keterlambatan penyediaan alat/material karena kelalaian kontraktor. Untuk mengatasi persoalan ini beberapa langkah yang dilakukan dinas PUPR adalah membuat addendum kontrak untuk pemberian kesempatan/waktu selama 50 HK kepada kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas dan dikenakan denda keterlambatan. Pemberian addendum ini didahului dengan:

1. Kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjaan;
2. Kontraktor bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

3. Kontraktor membuat surat pernyataan tidak menuntut denda/bunga karena keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun berikutnya.;
4. Pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan 2021.

Dalam periode 5 tahun yaitu 2016-2020 pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang jalan dan jembatan oleh Dinas PUPR telah memberikan dampak peningkatan layanan aksesibilitas dan konektivitas serta kelancaran transportasi masyarakat Manggarai.

Sejak tahun 2016-2020 dari pencapaian hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan” dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**

Data capaian kinerja bidang jalan Dinas PUPR tahun 2021, menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas PUPR mengalami naik turun disetiap tahun. Hal ini disebabkan karena panjang jalan keseluruhan mengalami perubahan akibat pengalihan status ruas jalan tertentu. Sedangkan panjang jalan kondisi baik sejak tahun 2016-2021, mengalami perubahan kenaikan dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingan Tahun 2016 panjang jalan kondisi baik adalah 904,38 km dengan prosentase capaian proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah 91,14% (panjang jalan 1700,89km); Tahun 2017 panjang jalan kondisi baik adalah 923,90km (panjang jalan 1700,89km);, dengan prosentase capaian proporsi panjang jalan kondisi baik adalah 90,83%; Tahun 2018 panjang jalan kondisi baik adalah 964,39km dengan prosentase capaian proporsi panjang jalan kondisi baik adalah 92,39% (panjang jalan 1700,89km); Tahun 2019 panjang jalan kondisi baik adalah 972,41km, dengan prosentase capaian proporsi panjang jalan kondisi baik adalah 79,38% (panjang jalan 1904,60km); pada tahun 2020 panjang jalan kondisi baik adalah menjadi 1038km, dengan prosentase capaian proporsi panjang jalan kondisi baik adalah 80,68% (panjang jalan 1854,88); dan pada tahun 2021 panjang jalan kondisi baik adalah menjadi 1220,725km dengan prosentase capaian proporsi panjang jalan kondisi baik adalah 96,49%. (panjang jalan 1872,867km).

Apabila dikaitkan dengan target renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, untuk indikator proporsi panjang jalan kondisi baik sebesar 67,55% sudah terealisasi sebesar 65,18%, maka capaian kinerja sampai 2021 belum

mencapai target 100% atau masih tersisa 2,37%. Apabila dikonversi ke panjang jalan kondisi baik maka dari target panjang jalan kondisi baik 1.286,56km sudah terealisasi sepanjang 1220,725km. Atau sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 terdapat penambahan panjang jalan kondisi baik sepanjang 315,28km;(lihat tabel 3.4).

Tabel 3.4. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Sasaran	Indikator	Target							Realisasi							Deviasi	Sat	Prosentase Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total 2016 - 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total 2016-2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total 2016-2021
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	• Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	58,34	59,8	61,37	64,32	67,55	67,55	67,55	53,17	54,32	56,7	51,06	54,5	65,18	65,18	-2,37	%	91,14	90,83	92,39	79,38	80,68	96,49	80,68
		Total target 1286,56km							904,38	923,9	964,39	972,41	1.038	1.220,73	Total Realisasi 1220,73 km	Blm terealisasi 65,83km								
									Panjang jalan 1700,9	Panjang jalan 1700,9	Panjang jalan 1700,9	Panjang jalan 1904,6	Panjang jalan 1854,9	Panjang jalan 1872,867	Panjang jalan 1872,867									

- **Peningkatan jenis konstruksi jalan**

Target dan realisasi peningkatan jenis konstruksi jalan 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Peningkatan jenis konstruksi jalan

Sasaran	Indikator	Target							Realisasi							Prosentase Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total 2016-2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	Total 2016-2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total 2016-2021
Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	Peningkatan jenis konstruksi jalan	146,66	235,28	147,26	160,7	156	846,4	846,42	149,1	92,75	86,06	93,76	35,07	50,39	507,122	507,12	101,66	39,42	58,44	58,33	22,48	5,95	59,91
	- Telford	12,16	78,37	19,07	19,37	17,03	146	146	36,77	11,23	13,23	12,22	7,867	7,650	88,973	88,973	302,4	12,94	69,38	63,09	46,19	5,24	60,94
	- Lapen	117,25	130,69	100,2	103,7	103	554,9	554,86	84,38	55,33	54,62	62,42	27,2	29,286	313,238	313,24	71,97	41,99	54,51	60,19	26,4	5,28	56,454
	- HRS (Hotmix)	17,25	26,22	27,99	37,66	35,94	145,6	145,56	27,94	26,19	18,21	19,12	0	13,450	104,911	104,91	162	99,89	65,06	50,77	0	9,24	72,074

Melihat tabel target dan realisasi serta prosentase capaian peningkatan jenis konstruksi jalan 2016-2021, terlihat realisasi dan capaiannya mengalami naik turun. Hal ini bergantung pada ketersediaan anggaran untuk penanganan jalan pada tiap tahun anggaran. Pada tahun 2016 realisasi terlihat lebih besar dari tahun-tahun sesudahnya. Sedangkan pada tahun 2017-2021, anggaran pembangunan jalan hanya bersumber dari dana DAU dan dana DAK. Pada tahun 2021 jauh lebih kecil karena pemangkasan anggaran untuk penanganan pandemic covid 19.

Dari kondisi yang sudah dijelaskan diatas, target 2016-2021 untuk indikator peningkatan jenis konstruksi jalan telford, lapen dan Hotmix sudah terealisasi 504,20km dari target 846,42km, dengan deviasi 342,22km.

- **Jumlah Jembatan dalam kondisi baik**

Realisasi pembangunan jembatan baru dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah 284 unit jembatan dari kondisi awal tahun 2015 jumlah jembatan adalah 246 unit. Tahun 2016 sampai dengan 2021 kegiatan pembangunan jembatan menghasilkan 38 unit jembatan. Sampai akhir tahun 2021 jumlah total jembatan adalah 282 unit dengan kondisi baik 276 unit dan rusak sebanyak 6 unit. Dan 2 unit jembatan yang beralih status menjadi aset Provinsi NTT.

Berdasarkan uraian diatas, target 2016-2021 untuk indikator jumlah jembatan dalam kondisi baik sebanyak 44 unit sudah terealisasi 43 unit (97,73). Dari hasil ini jumlah jembatan dalam kondisi baik yang belum tercapai adalah 1 unit (25%). (lihat tabel 3.6)

Tabel 3.6. Jumlah Jembatan dalam kondisi baik

Sasaran	Indikator	Target							Realisasi							Devi-asi	Sat	Prosentase Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total 2016-2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total 2016-2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total 2016-2021
Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	15	8	8	8	5	44	44	13	7	6	6	5	6	43	-1	unit	86,67	87,5	62,5	37,5	100	13,64	97,73

Berdasarkan capaian sasaran strategis “**Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan**” dan dikaitkan dengan target renstra, terlihat pembangunan infrastruktur jalan masih menghadapi masalah diantaranya *kondisi jaringan jalan yang belum memadai*. Ini terlihat antara lain pada masih banyaknya jaringan jalan di Kabupaten Manggarai dalam kondisi rusak; kurangnya sarana pelengkap jalan (seperti drainase, trotoar, dll); Pembukaan jalan baru tidak sebanding dengan peningkatan konstruksi jalan (terus bertambahnya pembukaan jalan tanah yang tidak diikuti dengan peningkatan konstruksi jalan dari jalan tanah ke Telford/Lapen/HRS).

Munculnya permasalahan ini dapat disebabkan oleh antara lain keterbatasan anggaran; dan adanya masalah pembebasan lahan untuk pembangunan dan perluasan ruas jalan/jembatan; serta Penambahan/pengurangan ruas jalan yang tidak segera dilanjutkan dengan pemutakhiran data base jalan.

Strategi yang telah dan akan dilakukan Dinas PUPR antara lain :

- ✓ Pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan (pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan/jembatan) yang disertai dengan penyediaan bangunan pendukung jalan/jembatan;
- ✓ Menyediakan sistem drainase jalan untuk mencegah kerusakan jalan dan mencegah terjadinya banjir;
- ✓ Penataan jaringan jalan/jembatan perkotaan melalui pembangunan jalan lingkar luar agar tidak mengganggu lalu lintas dalam kota;
- ✓ Design perencanaan pembangunan jalan/jembatan yang matang.

Disamping strategi yang telah direncanakan tersebut, perlu dukungan pemerintah dalam penyediaan dana demi terlaksananya program kegiatan bidang jalan/jembatan.

2). Sasaran 2 :Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat” dinas PUPR melaksanakan satu program dan satu kegiatan yang pencapaiannya diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu Rasio jaringan irigasi dan Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

No	Indikator Kinerja	Sat.	Thn 2020		%	Thn 2021		%
			Targe t	Realisa si		Target	Realisa si	
1	Rasio jaringan irigasi	%	82,39	77,43	93,98	82,39	80,28	97,44
2	Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	54,44	68,79	126,36	54,44	71,64	131,59
	RATA-RATA				110,17			114,52
	KATEGORI						MEMUASKAN	

Analisis capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Rasio jaringan irigasi

Rasio jaringan irigasi yang dimaksudkan adalah bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi yang diperoleh dengan rumus :

$$\text{Rasio jaringan irigasi} = \frac{\text{Luas DI yg tertangani} \times 100}{\text{Luas seluruh DI}}$$

Luas Daerah Irigasi yang tertangani jaringan irigasi sampai dengan tahun 2021 adalah 15.922ha dari Luas Daerah irigasi kewenangan kabupaten adalah 19.833ha. Sedangkan total panjang saluran yang tertangani sampai dengan tahun 2021 adalah 117.848m dari total panjang saluran irigasi kewenangan kabupaten 302.369m.

Dengan demikian capaian rasio jaringan irigasi adalah sebesar 80,28% dihitung dengan rumus :

$$\frac{15.922 \text{ ha}}{19.833 \text{ ha}} \times 100\% = 80,28\%$$

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 77,43% terlihat capaian tahun 2021 mengalami peningkatan.

Sedangkan rasio jaringan irigasi yang merupakan perbandingan antara panjang saluran irigasi terhadap luas lahan budidaya adalah sebesar 24,41 yang diperoleh dari rumus perhitungan :

$$\text{Rasio jaringan irigasi} = \frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas Lahan Budidaya}}$$

Panjang Saluran Irigasi tahun 2021 302.369 M dan Luas Lahan Budidaya adalah 12.388,1042 ha, sehingga diperoleh :

$$\text{Rasio jaringan irigasi} = \frac{302.369}{12.388,1042} = 24,41$$

- Prosentase luas irigasi kabupaten dalam

kondisi baik

Indikator Sasaran	Tahun 2020		%	Tahun 2020		%
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	54,44	68,79	126,36	54,44	71,64	131,59

Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten} \times 100.$$

Sampai tahun 2021 Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik adalah seluas 14.209ha dari total luas D.I kewenangan kabupaten sebesar 19.833 ha.

Dari tabel di atas dapat dilihat prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 71,64% dengan tingkat capaian 131,59% atau dengan rumus :

$$\frac{14.209 \text{ ha}}{19.833 \text{ ha}} \times 100\% = 71,64\%$$

Prosentase capaian sasaran strategis **Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat** tahun 2021 memperoleh hasil pengukuran Memuaskan dengan nilai 114,54% didukung dengan anggaran Rp. 6.273.200.959,- dan terealisasi sebesar Rp.6.262.153.300,- (99,82%), melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Berdasarkan uraian diatas, dikaitkan dengan target renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai realisasi pencapaian target dalam periode 2016-2021 untuk indikator **Rasio**



jaringan irigasi yaitu untuk mengukur bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi sudah terealisasi pada hampir seluruh target yang telah ditetapkan dan hanya menyisakan 2,11 % yang belum tercapai.

Sedangkan **Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik** dimana target pada tahun 2020 sebesar 54,44% dan capaian sampai tahun ini 71,64% maka untuk indikator ini sudah melebihi target renstra. (lihat tabel 3.7).

Tabel 3.7.Data Irigasi 2016-2021

NO	IRIGASI	RUMUS	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	(Luas irigasi Kab. Kondisi baik/Luas Irigasi Kab) X 100%	57,74%	59,40%	59,67%	68,76%	68,79%	71,64%
2	Rasio Jaringan Irigasi	(Panjang saluran irigasi lahan / Luas Lahan Budidaya Pertanian) X 100%	20,10	21,95	22,18	21,81	21,81	24,41
		bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi	60,67%	61,19%	66,39%	76,37%	77,43%	80,28%
3	Jenis Prasarana Irigasi / Pengairan							
	a.Non Teknis (M)		183.087	188.876	183.712	182.922	179.984	177.258
	b.Teknis (M)		90.809	109.923	117.562	118.352	121.290	125.111
	Primer		88.679	99.779	99.876	96.548	98.758	100.779,00
	Sekunder		1.083	15.672	16.601	20.601	21.321	22.921,00
	Tersier		847	910	1.085	1.203	1.211	1.411
	a. Panjang jaringan M		273.895	299.144	302.369	302.369	302.369	302.369
	b. Panjang yang tertangani M		103.530	100.090	108.883	110.872	114.027	117.848
	c. Luas Irigasi		22234 Ha	22234 Ha	22234 Ha	19833 Ha	19833 Ha	19833 Ha
	d. Luas Irigasi dalam Kondisi Baik		12838 Ha	13208 Ha	13268 Ha	13368 Ha	13443 Ha	14209 Ha
	d. Luas Irigasi yang tertangani		13490 Ha	13606 Ha	14761 Ha	15146 Ha	15356 Ha	15922 Ha
1	Kondisi Daerah irigasi	Kondisi Daerah Irigasi	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Baik	12.838	13.208	13.268	13.638	13.643	14.209
		Rusak Ringan	2.823	2.718	2.568	1.218	1.050	1.050
		Rusak Sedang	4.658	4.578	4.658	4.056	4.608	4.574
		Rusak Berat	1.915	1.730	1.740	921	532	-
		Total	22.234	22.234	22.234	19.833	19.833	19.833
		tidak baik	9.396	9.026	8.966	6.195	6.190	5.624
2	Panjang Jaringan	Jaringan Irigasi	Panjang (meter)					
		Primer	200.562,00					
		Sekunder	98.257,00					
		Tersier	3.550,00					
		Panjang Total jaringan	302.369					

3). Sasaran 3: Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih

Realisasi pencapaian sasaran Strategis “Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih” pada tahun 2021 adalah sebesar 282.413 jiwa atau mencapai 80,90%.

Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 79,93% (270.743 jiwa) atau bertambah 4,13%.

Untuk mengukur realisasi capaian sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menggunakan 1 (satu) indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih	100	80,90	80,90	100	82,08	82,09
	RATA-RATA			80,90			80,90
	KATEGORI						Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2021 capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih adalah 82,08% dengan perhitungan jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih dibagi jumlah penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2020. Rumus :

$$\text{Prosentase jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih} = \frac{281.094}{342.463} \times 100\% = 82,08\%$$

Dari jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2021 342.463 jiwa (*Data jumlah penduduk Dispenduk Capil*), yang berakses air minum sebanyak 281.094 jiwa. Dengan demikian realisasi capaian indikator ini sebesar 82,08% dengan tingkat capaian 82,08%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 80,90% maka capaian tahun 2021 meningkat 1,18%, sehingga jumlah penduduk terlayani air minum bersih Tahun 2021 adalah 281.094 jiwa. Jumlah anggaran untuk mendukung sasaran ini adalah Rp.15.054.089.234,- dan terserap Rp.14.615.619.507,- (97,09%) melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Apabila dikaitkan dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, dimana target pada tahun 2021 sebesar 100% sedangkan capaian sebesar 82,09% maka kedepan Dinas PUPR masih akan terus mengembangkan strategi menuju 100% layanan air minum bersih bagi masyarakat Manggarai.

Permasalahan umum yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran strategis ini adalah ketersediaan air pada kawasan mata air dan sekitarnya yang semakin menurun; keterbatasan anggaran; serta masalah pembebasan lahan.

Berbagai upaya Dinas PUPR yang sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan untuk mencapai target 100% pelayanan air minum bersih antara lain :

- ✓ Perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas air minum; seperti lokasi pembangunan SPAM baik sumber air baku, bangunan mesin, jaringan pipa, hidran umum dan lain-lain;
- ✓ Perlu melakukan kajian yang mendasar mengenai pengelolaan SPAM yang melibatkan seluruh stakeholders dalam teknis perencanaan, pelaksanaan dan operasional agar pasca pembangunan SPAM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- ✓ Alokasi dana yang cukup, terutama untuk pembebasan lahan;
- ✓ Membuat dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum/Bersih Minum/Bersih yang komprehensif, inklusif dan terintegrasi serta didukung dengan kebijakan daerah Peraturan Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) air Minum/Bersih.

Persentase penduduk yang terlayani air minum bersih
Tahun 2016-2021

TAHUN	JLH PENDUDUK YANG TERLAYANI AIR MINUM BERSIH
2016	251.629 jiwa
2017	252.083 jiwa
2018	263.691 JIWA
2019	270.374 JIWA
2020	282.413 JIWA
2021	281.094 JIWA

Grafik 1.2.



4). Sasaran 4: Tersedianya sarana persampahan

Tahun 2021 ini merupakan tahun awal pelaksanaan program kegiatan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan permendagri tersebut terkait penyediaan infrastruktur persampahan menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Manggarai. Sedangkan pengelolaan persampahan tetap menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai.

Di tahun 2021 Dinas PUPR telah menganggarkan pengadaan belanja modal tanah TPA. Namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terjadi refocusing anggaran di awal tahun 2021. Sehingga belanja modal tanah TPA sudah dianggarkan kembali di tahun 2022 melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Sehingga realisasi pencapaian sasaran Strategis “Tersedianya sarana persampahan” pada tahun 2021 adalah sebesar nol persen dari target 5 ha tanah. Pada tahun 2021 dinas Pupr hanya melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pengadaan lahan TPA dengan total Rp.143.090.000 hanya terserap 15,47 % atau sebesar Rp.22.140.000,-.

Untuk mengukur realisasi capaian sasaran ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menggunakan 1 (satu) indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020			%	Tahun 2021		
		Target	Realisasi			Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya sarana persampahan	-	-	-	5 ha	-	0	
	RATA-RATA			-			0	
	KATEGORI						Buruk	

5). Sasaran 5: Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi Lingkungan

Sebagaimana program persampahan, demikian juga dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, di tahun 2021 menjadi urusan pekerjaan umum yang sebelumnya ditangani Dinas Perumahan. Untuk mengukur realisasi capaian sasaran ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menggunakan 1 (satu) indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi Lingkungan	-	-	-	1444 KK	1444 KK	100%
	RATA-RATA			-			100%
	KATEGORI						Memuaskan

Realisasi yang dicapai tahun 2021 melalui pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual dari target 1.444 unit adalah sebesar 100%. Berdasarkan capaian ini maka capaian jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi sampai tahun 2021 adalah sebesar 71,92%.

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran ini total anggaran yang disediakan adalah Rp.11.084.468.400,- dengan realisasi Rp.11.046.678.412,- (99,66%).

6). Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menetapkan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

- Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Indikator Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100	253,57	253,57	100	132,29	132,29
Rata-rata		253,57		100		132,29

(Target yang ditetapkan dan realisasi capaian program merupakan target dan realisasi untuk tahun berkenan (2021)).

Pada tahun 2021 realisasi pembangunan drainase adalah 1,98 km dari target 1,5 km dengan tingkat capaian 132,29%. Pencapaian ini merupakan realisasi output tahun berjalan (tahun 2021), yaitu pembangunan drainase pada 15 lokasi yang tersebar di wilayah kecamatan Langke Rembong, Lelak, Cibal barat dan Rahong Utara. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 1,01429km dari target 0,4 km dengan tingkat capaian 253,57%, maka realisasi tahun 2021 lebih kecil. Harapannya adalah pada tahun berikutnya kinerja untuk penangan drainase akan lebih baik. Terutama pada kawasan padat penduduk dimana saluran drainase sudah dipenuhi tumpukan sampah, sediman tanah, dan material lain yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air, menimbulkan genangan air, aroma yang tidak sedap, yang mengganggu aktifitas sehari-hari. Diperlukan perhatian dan kerjasama dari masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bekerja untuk menciptakan kota yang lebih bersih, dengan saluran drainase yang bebas genangan.

Untuk mendukung indikator ini, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.2.717.604.116,- dengan realisasi Rp.2.477.231.122,- atau 91,15%, melalui satu program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Berdasarkan uraian diatas, dan hanya mengacu pada panjang saluran drainase yang terbangun dari target 2016-2020 untuk indikator ini sepanjang 51.05km, maka panjang drainase terbangun sudah terealisasi 53,113 km atau 104,081%.

Realisasi Pembangunan drainase 2016-2021

TAHUN	REALISASI	SATUAN
2021	1,984	km
2020	1,414	km
2019	9,178	km
2018	10,000	km
2017	11,390	km
2016	21,130	km
TOTAL 2016-2021	53,113	km

Persoalan terkait penyediaan system drainase masih menjadi masalah serius. Munculnya sampah dalam saluran drainase, baik drainase dilingkungan permukiman maupun drainase jalan menjadi penyebab masalah lain. Adanya genangan air pada badan jalan, munculnya aroma yang tidak sedap dari drainase yang tersumbat sampah menjadi masalah yang sering kita hadapi.

Beberapa langkah antisipasi dan penanggulangan yang telah dilakukan dinas PUPR dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada antara lain :

- ✓ pembangunan dan pemeliharaan sistem pengelolaan drainase sesuai dengan fungsinya.
- ✓ Pada tahap lanjutan, perlu dibuat master plan drainase yang up to date.
- ✓ Himbauan kepada masyarakat tentang pengelolaan system drainase.

7). Sasaran 7 : Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menjabarkan dalam 2 (dua) program yaitu (1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran Rp.887.067.000,- terealisasi Rp.872.283.100,-; (2)Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran Rp.366.369.000,- dengan realisasi Rp.209.919.000,-; dengan 1 (satu) indikator kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	95	41.67	43,86	95	41.67	43,86
	RATA-RATA			43,86			43,86
	KATEGORI						KURAN G

Untuk mengukur capaian indikator ini digunakan rumus :

Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	=	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang memiliki dokumen RDTR}}{\text{Jumlah kecamatan}}$	X 100%
	=	$\frac{5}{12}$	X 100%
	=	41,67%	

Prosentase capaian : $\frac{41,67\%}{95\%} \times 100\% = 43,86\%$

Sebagaimana tahun 2020, capaian kinerja sasaran Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR pada tahun 2021 juga merupakan capaian selama beberapa tahun terakhir yaitu dengan tersusunnya 5 dokumen RDTR yaitu RDTR kawasan strategis cancar dan Reo Kecamatan Ruteng dan Kecamatan Reok, RDTR kawasan strategis Kecamatan Langke Rembong, RDTR Kecamatan Satar Mese Barat, dan RDTR Kecamatan Reok Barat. Seluruh kegiatan RDTR kabupaten Manggarai masih terhalang belum ditetapkannya Perda Revisi RTRW Kabupaten Manggarai.

Tahun 2021 kegiatan yang telah dilakukan dinas adalah kegiatan penyusunan rancangan Perda RTRW. Kegiatan ini merupakan langkah lanjutan setelah tersusunnya dokumen teknis Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032, yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu.

Pada tahun 2021 Dinas kembali merencanakan kegiatan untuk menyelesaikan penyusunan Perda RTRW kabupaten Manggarai. Dinas PUPR tetap melakukan koordinasi ke tingkat pusat, provinsi maupun koordinasi lintas sectoral tingkat kabupaten. Namun target Dinas untuk menyelesaikan kegiatan penting ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rancangan Perda RTRW Kabupaten Manggarai masih menunggu persetujuan substansi kementerian agar dapat ditetapkan menjadi Perda definitif. Berbagai kebijakan nasional harus tetap dikedepankan termasuk penundaan/pembatalan seluruh kegiatan rapat/meeting. Dengan adanya kebijakan ini, pelaksanaan rapat-rapat terkait finalisasi penyusunan Perda RTRW harus ditunda.

Apabila dikaitkan dengan target renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dimana target pada tahun 2021 sebesar 95% sedangkan capaian sampai tahun ini hanya 41,67% maka sasaran strategis ini tidak mengalami perkembangan. Kendala yang dihadapi terkait pencapaian sasaran ini antara lain belum adanya regulasi tentang RDTR ataupun regulasi lain yang terkait; Pada Tahun 2021 Dinas PUPR telah sampai pada tahap penyusunan dokumen perencanaan teknis RRTR sehingga diharapkan di tahun 2022 bisa terealisasi perda RDTR.

Beberapa strategi Dinas Kabupaten Manggarai dalam rangka pelaksanaan tata ruang antara lain dengan dibuatnya RTRW serta Peraturan turunan maupun aturan lain yang terkait serta melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang.

8). Sasaran 8 : Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menetapkan 1 (satu) kebijakan yang dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	100	31,67	31,67	100	93,33	93,33
	Rata-Rata			31,67			93,33
	Kategori						Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pengendalian jasa konstruksi adalah 93,33% yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 100% (60 perusahaan), realisasi 56 perusahaan dengan tingkat capaian 93,33%. Ini berarti jumlah perusahaan yang mengajukan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pada tahun 2021 sebanyak 56 perusahaan sehingga diperoleh hasil 93,33% dengan rumus :

$$\frac{56}{60} \times 100\% = 93,33\%$$

Pada tahun 2021 prosentase pengendalian jasa konstruksi sebesar 93,33% (56 perusahaan) dan tahun 2019 31,67% (57 perusahaan), tahun 2018 147.62% (155 perusahaan) dari target yang ditetapkan 100% dengan tingkat capaian masing-masing 31,67%, 55,48% dan 147.62%. Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2018-2021 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sangat tergantung pada kesediaan penyedia untuk mendapatkan ijin. Hal ini disebabkan karena masa berlaku ijin usaha jasa konstruksi selama 3 tahun dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda untuk setiap perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Manggarai menghadapi kendala yang disebabkan antara lain masih lemahnya pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan pelaku jasa konstruksi.

Untuk itu beberapa langkah Dinas PUPR Kabupaten Manggarai dalam pembinaan konstruksi diantaranya:

- ✓ Peningkatan kinerja Dinas PUPR dan Lembaga Masyarakat Jasa Konstruksi melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi;
- ✓ Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dalam rangka peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi
- ✓ Mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan konstruksi;

Selain 8 (delapan) sasaran strategis tersebut, terdapat satu sasaran strategis Berkurangnya resiko daya rusak air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 12 kecamatan yang berdasarkan hasil capaian kinerja sampai tahun 2020 sudah mencapai 100%.

Normalisasi sungai	2016	2017	2018	2020	2021		Total 2016-2021
	Bronjong	Bronjong	Bronjong	Bronjong	Bronjong	Pasangan Batu	
	102,41	252,04	270,76	141,07	14,00	12,42	792,70

Namun demikian masih ada persoalan terkait DAS seperti degradasi daerah aliran sungai (DAS) sebagai akibat alih fungsi DAS. Daerah aliran sungai dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau lebih buruk lagi menjadi tempat pembuangan sampah rumah tangga/sampah usaha. Pembangunan gedung yang tidak lagi memperhatikan aturan DAS menambah persoalan seputar DAS.

Beberapa langkah antisipasi dan penanggulangan yang telah dilakukan dinas PUPR antara lain adalah melalui pelaksanaan kegiatan normalisasi. Selanjutnya, Dinas PUPR akan meningkatkan pengawasan serta monitoring.

Disamping tujuh (8) sasaran strategis, terdapat pula program pendukung yang sangat berperan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis dinas.

Capaian program dan kegiatan pendukung tersebut seperti table 3.8. berikut :

PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG :					
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Terlaksananya Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas	100	100,00	100,00
2	Terlaksananya penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas dengan baik dan benar	Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan baik dan tepat waktu	100	100,00	100,00
3	Terlaksananya Koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian	Prosentase Jumlah urusan kepegawaian yang terlaksana	100	100,00	100,00
4	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	100	100,00	100,00
	Rata-rata				100,00
	Kategori				MEMUASKAN

B. REALISASI ANGGARAN

1. Target dan realisasi anggaran

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Daerah	950.000.000,-	381.242.214,-	40,13
B.	Belanja	124.233.066.046	121.924.918.825	98,14
1	Belanja Operasi	22.293.268.989	21.230.967.312	95,23
	1).Belanja Pegawai	5.621.240.763	5.260.883.755	93,59
	2).Belanja barang dan jasa	16.672.028.226	15.970.083.557	95,79
2	Belanja Modal	101.939.797.057	100.693.951.513	98,78

Pendapatan

Selain melaksanakan pembangunan infrastruktur Dinas PUPR juga merupakan OPD yang mengelola PAD. Sumber PAD Dinas PUPR adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang pekerjaan umum dan retribusi izin mendirikan bangunan. Pada APBD induk target PAD Dinas PUPR adalah sebesar Rp.1.718.050.000,-. Dan pada Perubahan APBD target PAD Dinas PUPR menjadi Rp.950.000.000,-.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.381.242.214,- (40,13%), yang bersumber dari hasil retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang pekerjaan umum dan retribusi izin mendirikan bangunan. Jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 sebesar Rp. 649.068.349,- pendapatan tahun 2021 turun 41,26%, sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3.9. Realisasi Pendapatan 2021

NO	URAIAN	Target Pendapatan 2021	REALISASI		BERTAMBAH/ BERKURANG	
			2021	2020		
	Pendapatan Asli Daerah	950.000.000	381.242.214	649.068.349	(267.826.135)	(41,26)
1	Retribusi Pemakaian Alat	750.000.000	365.649.664	606.399.020	(240.749.356)	
2	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000	15.592.550	42.669.329	(27.076.779)	

Belanja

Jumlah alokasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor 915/BKAD/04/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.124.233.066.046,- yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 121.924.918.825,- atau terserap 98,14% dari target 100%.

Rincian realisasi anggaran dan capaian belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 seperti pada table berikut :

Tabel 3.10. Anggaran, realisasi dan capaian belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	Total	124.233.066.046	121.924.918.825	98,14
1	Belanja Operasi	22.293.268.989	21.230.967.312	95,23
	1).Belanja Pegawai	5.621.240.763	5.260.883.755	93,59
	2).Belanja barang dan jasa	16.672.028.226	15.970.083.557	95,79
2	Belanja Modal	101.939.797.057	100.693.951.513	98,78

2. Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

Rincian realisasi anggaran belanja menurut sasaran program/kegiatan strategis Dinas PUPR Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.11.

**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM PER SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021**

No	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PROSENTASE KEUANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	80.343.521.308	79.553.120.134	99,02
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	775.852.000	773.393.000	99,68
		RATA-RATA	81.119.373.308	80.326.513.134	99,02
2	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.273.200.959	6.262.153.300	99,82
		RATA-RATA	6.273.200.959	6.262.153.300	99,82
3	Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air minum Bersih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.054.089.234	14.615.619.507	97,09
		RATA-RATA	15.054.089.234	14.615.619.507	97,09
4	Tersedianya sarana persampahan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	143.090.000	22.140.000	15,47
		RATA-RATA	143.090.000	22.140.000	15,47
5	Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.084.468.400	11.046.678.412	99,66
		RATA-RATA	11.084.468.400	11.046.678.412	99,66

No	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PROSENTASE KEUANGAN
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.717.604.116	2.477.231.122	91,15
		RATA-RATA	2.717.604.116	2.477.231.122	91,15
7	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	887.067.000	872.283.100	98,33
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	366.369.000	209.919.000	57,30
		RATA-RATA	1.253.436.000	1.082.202.100	86,34
8	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	212.130.300	156.641.230	73,84
		RATA-RATA	212.130.300	156.641.230	73,84
JUMLAH PROGRAM STRATEGIS (10 program)			117.857.392.317	115.989.178.805	98,41
	PROGRAM PENDUKUNG		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PROSENTASE KEUANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.375.673.729	5.935.740.020	93,10
JUMLAH PROGRAM STRATEGIS + PROGRAM PENDUKUNG (11 program)			124.233.066.046	121.924.918.825	98,14
RATA-RATA CAPAIAN 8 SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021 (Form Pengukuran Kinerja Tahun 2021)					81,35
TINGKAT EFEKTIVITAS ANGGARAN TERHADAP RATA-RATA CAPAIAN 8 SASARAN STRATEGIS					-16,79

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 dari delapan (8) sasaran strategis sebesar 81,33% dengan kategori BAIK, dan penyerapan anggaran pada delapan (8) program strategis dan program pendukung sebesar 98,14%. Berdasarkan rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, maka penganggaran pada Dinas PUPR Tahun 2021 tidak efisien dengan tingkat ketidakefisien mencapai 16,81%.

Secara umum untuk tahun 2021 prosentase capaian kinerja lebih rendah disebabkan karena penentuan target sasaran strategis yang akan dicapai tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran, terutama setelah refocusing anggaran. Tidak dilakukannya penyesuaian target-target kinerja dalam perjanjian kinerja Dinas PUPR Tahun 2021, sedangkan anggaran sudah berkurang, sangat mempengaruhi capaian output dan hasil pelaksanaan program kegiatan tahun 2021.

Tingkat efisiensi penganggaran tahun 2021 berdasarkan masing-masing sasaran strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12. Tingkat Efisiensi Penganggaran Tahun 2021

No	SASARAN	% RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	84,60	81.119.373.308	80.326.513.134	99,02	Tidak efisien
2	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	114,52	6.273.200.959	6.262.153.300	99,82	Efisien
3	Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air minum Bersih	82,08	15.054.089.234	14.615.619.507	97,09	Tidak efisien
4	Tersedianya sarana persampahan	-	143.090.000	22.140.000	15,47	Tidak efisien
5	Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi Lingkungan	100,00	11.084.468.400	11.046.678.412	99,66	Efisien
6	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman	132,29	2.717.604.116	2.477.231.122	91,15	Efisien
7	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	43,86	1.253.436.000	1.082.202.100	86,34	Tidak efisien
8	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	93,33	212.130.300	156.641.230	73,84	Efisien
	JUMLAH 8 SASARAN	81,33	117.857.392.317	115.989.178.805	98,41	Tidak Efisien

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2021 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2021 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada tahun yang akan datang.

Secara umum capaian indikator kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis yang telah dilaksanakan memperoleh nilai 81,33% dengan kategori baik. Capaian dari masing-masing indikator kinerja bervariasi dan masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 50%, yaitu satu indikator yang capaiannya merupakan capaian dari tahun sebelumnya. Bahkan terdapat satu indikator yang capaiannya nol persen.

Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2021 sangat berdampak pada pencapaian target kinerja dinas PUPR. Tidak dilakukannya penyesuaian target-target kinerja dalam perjanjian kinerja Dinas PUPR Tahun 2021, sedangkan anggaran sudah berkurang, sangat mempengaruhi capaian output dan hasil pelaksanaan program kegiatan tahun 2021.

Sedangkan tidak terserapnya anggaran dari rencana, dikarenakan beberapa hal, antara lain:

- a. Adanya paket pekerjaan yang tidak terealisasi pembayarannya meskipun fisik sudah 100%; yang disebabkan karena penyedia tidak mengajukan pencairan dan menjadi Utang Tahun 2021;

- b. Adanya beberapa paket pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun 2020 sehingga pembayaran disesuaikan realisasi fisik pekerjaan.

Pada tahun 2021 terdapat 9 paket pekerjaan yang fisik pekerjaannya tidak dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak (fisik tidak mencapai 100%) dan merupakan paket *Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)*. Tidak terselesaikannya paket-paket ini sebagai akibat kelalaian kontraktor pelaksana.

Beberapa poin yang menjadi permasalahan dan perhatian penting pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021 antara lain:

1. Terbatasnya anggaran yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan didasarkan pada skala prioritas;
2. Keterlambatan proses penandatanganan kontrak fisik karena penyesuaian dengan kebijakan refocusing anggaran;
3. Adanya beberapa paket pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran berkurang;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dapat diandalkan pada masing-masing bidang;
5. Masih kurangnya rekanan yang profesional di bidang konstruksi.
6. Kondisi geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Lebih memaksimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada penyedia jasa untuk mendapatkan hasil kerja konstruksi yang bermutu dan tepat waktu;
2. Melaksanakan proses lelang lebih awal dan tepat waktu dengan melakukan koordinasi intens dengan pihak-pihak terkait;
3. Lebih fokus dalam pelaksanaan tugas

Seluruh jajaran dinas PUPR dalam penyelesaian tugas untuk fokus pada target-

target yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun target pemerintah daerah provinsi dan khususnya target pemerintah daerah kabupaten;

4. Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sektor, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan;
5. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/kegiatan prioritas, terutama yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.
6. Mengalokasikan anggaran yang cukup dengan tetap memperhatikan skala prioritas;
7. Mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan analisis kebutuhan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
8. Validitas data baik data perencanaan maupun data akhir sebagai bahan laporan dan evaluasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai ini disampaikan untuk maklum dan urusan selanjutnya.

Ruteng, Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

Lambertus Paput, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP.19660917 198603 1 006